

Analisis Potensi Tanaman Sagu (*Metroxylon sp*) sebagai Bahan Pangan Lokal untuk Mendukung Ketahanan Pangan di Provinsi Papua Barat

Arif Faisol^{1*}, Hostalige Hutasoit², Budiyono³, Mashudi⁴, Desi Natalia Edowai⁵

^{1,5}Prodi Teknik Pertanian dan Biosistem, Fakultas Teknologi Pertanian, Universitas Papua

²Prodi Teknologi Hasil Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian, Universitas Papua

³Prodi D3 Budidaya Pertanian dan Perkebunan, Fakultas Pertanian, Universitas Papua

⁴Prodi Ilmu Tanah, Fakultas Pertanian, Universitas Papua

Email: arif.unipa@gmail.com

Abstrak

Sagu merupakan salah satu komoditi sebagai bahan pangan lokal untuk mendukung ketahanan pangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui potensi sagu sebagai bahan pangan lokal untuk mendukung ketahanan pangan di Provinsi Papua Barat menggunakan metode Angka Kecukupan Energi (AKE). Penelitian terdiri atas 3 (tiga) tahapan utama, yaitu; (1) inventarisasi data, (2) analisis data, dan (3) penyusunan rekomendasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebutuhan sagu perkapita (PKB) sebesar 295,77 gram/kapita/hari apabila sagu dimanfaatkan sebagai sumber karbohidrat pengganti beras, sedangkan potensi produksi sagu di Provinsi Papua Barat pada tahun 2025 hanya sebanyak \pm 190 ton atau dapat memenuhi kebutuhan sagu sebesar 0,886 gram/kapita/hari. Oleh sebab itu produksi sagu yang ada di Provinsi Papua Barat saat ini hanya mampu memenuhi 0,30% kebutuhan konsumsi sagu (KPT) dan 0,27% kebutuhan ketersediaan sagu untuk dikonsumsi penduduk (KKP), sehingga sagu belum dapat menggantikan beras sebagai sumber karbohidrat. Namun ada beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan produksi sagu di Provinsi Papua Barat, diantaranya; perluasan areal tanaman sagu secara intensif, penggunaan varietas unggul dalam budidaya sagu, pengelolaan hutan sagu yang baik, serta penggunaan teknologi dalam pengolahan sagu. Dalam jangka pendek kebutuhan konsumsi sagu perkapita penduduk Provinsi Papua Barat dapat dipenuhi melalui impor sagu dari daerah lain di Papua, diantaranya Kabupaten Sorong Selatan Provinsi Papua Barat Daya dan Kabupaten Nabire Provinsi Papua Tengah.

Kata kunci: Sagu, Pangan, Ketahanan pangan

Abstract

Sago is one of the local commodities for supporting food security. This study aims to determine the potential of sago as a local commodity for supporting food security in West Papua Province using the Recommended Energy Allowance (REA) method. The research consists of 3 (three) main stages, i.e, (1) data inventory, (2) data analysis, and (3) recommendations. The research shows that the sago requirement per capita (PKB) is 295.77 grams/capita/day if sago is used as a primary source of carbohydrates. However, the potential for sago production in West Papua Province in 2025 is \pm 190 tons, or can supply 0.886 grams/capita/day of the sago requirement. Therefore, the production of sago in West Papua Province can supply 0.30% of sago consumption needs (KPT) and 0.27% of the availability of sago for population consumption (KKP). Consequently, the sago has not been able to replace rice as a primary source of carbohydrates in West Papua Province. However, there are several efforts to increase sago production in West Papua Province, i.e, expansion of sago plant area intensively, use of superior varieties in sago cultivation, good management of sago forests, and the use of technology in sago processing. In the short term, the import of sago from other regions in Papua, i.e, South Sorong Regency, Southwest Papua Province, and Nabire Regency, Central Papua Province, is one of the solutions to supply the sago requirement for consumption needs in West Papua Province.

Keywords: Sago, Food, Food security

PENDAHULUAN

Masalah pangan telah menjadi perhatian nasional dan internasional. Pada September 2015 melalui sidang umum Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) ke-70 di New York telah disepakati bahwa pangan menjadi salah satu program prioritas untuk mencapai pembangunan yang lebih baik dan berkelanjutan bagi seluruh penduduk dunia pada tahun 2030 yang tertuang dalam dokumen *Sustainable Development Goals* (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Perserikatan Bangsa-Bangsa, 2015). Selanjutnya Pemerintah menerbitkan sejumlah regulasi untuk merespon kesepakatan SDGs tersebut, diantaranya Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang kemudian diperbarui menjadi Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) Nomor 7 Tahun 2018 tentang Koordinasi, Perencanaan, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) Nomor 37/M.PPN/HK/05/2021 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Strategis Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) Nomor 127/M.PPN/HK/11/2018 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Nasional, Kelompok Kerja Nasional, Tim Pakar, dan Sekretariat Nasional Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Tahun 2017-2019, Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) Nomor 124/M.PPN/HK/09/2023 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Nasional, Kelompok Kerja Nasional, Tim Pakar, dan Sekretariat Nasional Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Tahun 2020-2024.

Pemerintah pusat dan pemerintah daerah juga telah menerbitkan sejumlah kebijakan dan regulasi untuk mendukung SDGs dan ketahanan pangan di Indonesia. Pemerintah telah menerbitkan Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang mengamanatkan agar pemerintah pusat dan daerah menjaga kedaulatan dan ketahanan pangan serta penganekaragaman konsumsi pangan. Pemerintah juga menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi yang mengatur upaya pemerintah dalam mewujudkan ketahanan pangan dan gizi serta penganekaragaman

konsumsi pangan. Pada tahun 2022 pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah yang mengatur tentang pengelolaan cadangan pangan pemerintah. Secara umum penerbitan regulasi tersebut bertujuan untuk menjaga ketersediaan pangan agar dapat memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, akses pangan yang baik bagi seluruh masyarakat, menjaga stabilitas harga pangan, dan terpenuhinya gizi pangan bagi seluruh masyarakat.

Penganekaragaman konsumsi pangan merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk menjaga ketahanan pangan, khususnya sumber pangan berbasis sumberdaya lokal. Untuk mendukung upaya ini pemerintah telah menerbitkan sejumlah regulasi, diantaranya; Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal, Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2024 tentang Percepatan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal, Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Standar Mutu Produk Pangan Lokal Dalam Rangka Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal, Peraturan Kepala Badan Ketahanan Pangan Nomor 57/KPTS/RC.110/J/12/2018 tentang Petunjuk Teknis Pengembangan Pangan Lokal Tahun 2019, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun 2009 tentang Gerakan Percepatan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal, Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 13 Tahun 2024 tentang Standar Mutu Produk Pangan Lokal Dalam Rangka Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal.

Sagu merupakan salah satu komoditi pangan lokal yang diharapkan mampu mendukung ketahanan pangan di Indonesia. Sagu merupakan pangan lokal diseluruh wilayah di Indonesia yang tinggal di daerah pesisir, diantaranya Maluku, Papua, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, dan Kepulauan Mentawai di Sumatera Barat (Febby I Polnaya & Timisela, 2008; Ansar *et al.*, 2021; Santoso, 2017; Hasbullah *et al.*, 2024; Dalimunthe *et al.*, 2019; Rosida, 2019) yang disajikan dalam bentuk pangan tradisional seperti papeda, tapurung, buburnee, tutupala, kapurut, bagea, sinole, dan lompong sagu (Hasbullah *et al.*, 2024; Rosida, 2019; Kurniawan, 2018; Dalimunthe *et al.*, 2019). Disamping itu sagu juga dapat disajikan dalam bentuk pangan modern seperti roti, biskuit, mie, sagu mutiara, sagon, dan sebagainya (Rosida, 2019; Dalimunthe *et al.*, 2019). Sagu juga telah digunakan secara luas sebagai bahan baku *monosodium glutamate* (MSG), minuman ringan, perekat, dan bioplastik (Dalimunthe *et al.*, 2019; Bintoro & Syakir, 2017).

Pemanfaatan sagu sebagai bahan pangan lokal memberikan beberapa keuntungan, diantaranya; memiliki kandungan karbohidrat yang lebih tinggi dibandingkan beras,

singkong, gandum, dan jagung (Bintoro & Syakir, 2017; Rosida, 2019), memiliki kandungan glikemik yang rendah sehingga aman dikonsumsi oleh penderita diabetes dan dapat mencegah obesitas (Bintoro & Syakir, 2017; Rosida, 2019), memiliki kandungan serat yang sangat tinggi sehingga dapat menurunkan kolesterol darah dan glukosa darah (Rosida, 2019). Disamping itu tanaman sagu memiliki kemampuan adaptasi yang baik dan dapat tumbuh di daerah marginal yang kurang cocok untuk tanaman lain, sehingga untuk pengembangannya tidak perlu bersaing tanaman pangan lainnya (Rosida, 2019; Bintoro & Syakir, 2017; Suripatty *et al.*, 2016). Tanaman sagu juga dapat tumbuh pada berbagai kondisi hidrologi, baik daerah yang terendam air sepanjang masa maupun daerah yang tidak terendam air (Dalimunthe *et al.*, 2019).

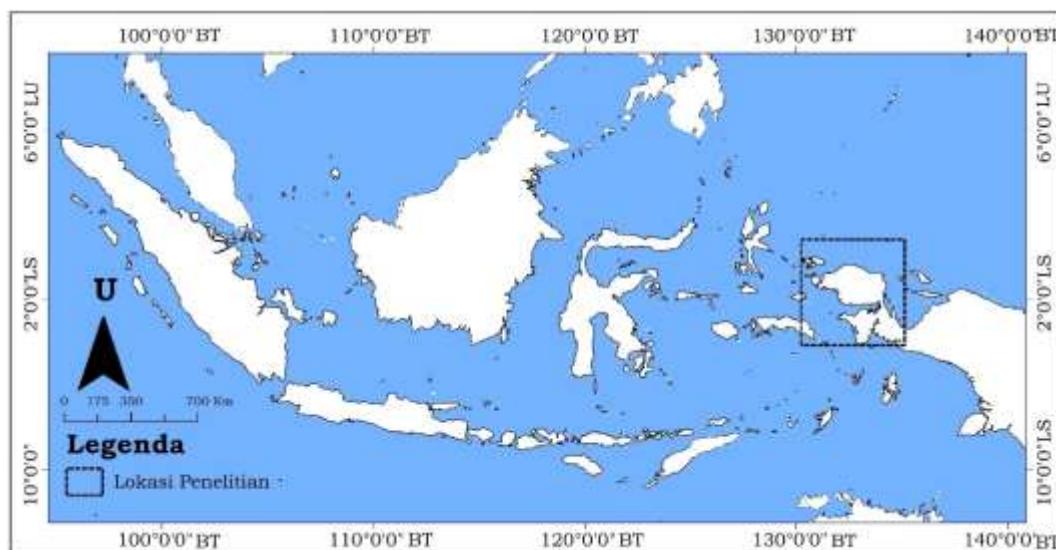
Pada tahun 2023 luas tanaman sagu di Indonesia diperkirakan \pm 214.623 Ha dengan potensi produksi \pm 393.284 ton (Kementerian Pertanian, 2024). Sedangkan luas tanaman sagu di Provinsi Papua Barat pada tahun 2023 diperkirakan \pm 876 Ha dengan potensi produksi \pm 190 ton (Kementerian Pertanian, 2024). Berdasarkan kondisi tersebut penelitian ini bertujuan untuk melakukan kajian tentang potensi tanaman sagu sebagai bahan pangan lokal untuk mendukung ketahanan pangan di Provinsi Papua Barat.

METODE

Penelitian ini dilakukan di Provinsi Papua Barat pada bulan Juli – Agustus 2025. Lokasi penelitian disajikan pada Gambar 1. Alat yang digunakan pada penelitian ini antara lain laptop dan perangkat lunak MS Office. Sedangkan bahan dan sumber data yang digunakan pada penelitian ini disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Data yang Digunakan pada Penelitian

No	Data	Sumber
1	Jumlah penduduk Provinsi Papua Barat tahun 2025	BPS Provinsi Papua Barat
2	Tabel Komposisi Pangan Indonesia	Kementerian Kesehatan
3	Angka Kecukupan Energi (AKE)	Badan Pangan Nasional
4	Pola konsumsi sagu masyarakat	Kementerian Pertanian
5	Luas dan produksi sagu di Provinsi Papua Barat	Kementerian Pertanian
6	Produktivitas sagu	Kementerian Pertanian, hasil penelitian



Gambar 1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini terdiri atas 2 (dua) tahapan utama, yaitu;

1. Inventarisasi data

Tahapan ini bertujuan untuk mengoleksi data-data yang dibutuhkan pada penelitian ini. Data-data dan sumber data yang digunakan pada penelitian ini disajikan pada Tabel 1.

2. Analisis Data

Tahapan ini bertujuan untuk menghitung jumlah kebutuhan sagu pertahun dan kebutuhan luas tanam untuk memenuhi kebutuhan sagu sebagai sumber karbohidrat di Provinsi Papua Barat. Adapun prosedur analisis pada penelitian ini sebagai berikut:

a. Menghitung kebutuhan energi sagu

Kebutuhan energi sagu mengacu kepada nilai Angka Kecukupan Energi (AKE) standar nasional dan dihitung menggunakan persamaan berikut:

$$AKE = \frac{TKE}{\% BP}$$

Keterangan:

AKE = Angka Kecukupan Energi (kkal)

TKE = Total konsumsi energi berdasarkan standar nasional (kkal)

% BP = Persentase komposisi bahan pangan berdasarkan komposisi pangan nasional

Komposisi bahan pangan dihitung berdasarkan pola pangan harapan nasional yaitu : 50% padi-padian, 6% umbi-umbian, 12% pangan hewani, 10% minyak dan lemak, 3% buah/biji minyak, 5% kacang-kacangan, 5% gula, dan 6% sayur dan buah, dan 3% aneka bumbu dan bahan minuman (Badan Pangan Nasional, 2024).

b. Menghitung kebutuhan sagu perkapita

Kebutuhan sagu perkapita dihitung menggunakan persamaan berikut:

$$KPB = \frac{AKE \times 100}{Ke \times \% BDD}$$

Keterangan:

AKE = Angka Kecukupan Energi (kkal)

KPB = Kebutuhan konsumsi sagu per kapita (gram/kapita/hari)

Ke = Kandungan energi sagu dalam 100 gram (kkal)

% BDD = Persen dapat dikonsumsi setiap 100 gram sagu

c. Menghitung kebutuhan sagu

Kebutuhan sagu dihitung menggunakan persamaan berikut:

$$KPT = \frac{KPB \times Pddk \times 365}{1.000.000}$$

Keterangan:

KPT = Kebutuhan konsumsi sagu dalam setahun (ton)

KPB = Kebutuhan konsumsi sagu per kapita (gram/kapita/hari)

Pddk = Jumlah penduduk

1.000.000 = Faktor konversi dari gram ke ton

365 = Faktor konversi dari hari ke tahun

d. Menghitung kebutuhan ketersediaan sagu

Kebutuhan ketersediaan sagu untuk dikonsumsi penduduk Papua Barat diperkirakan sebesar 110 persen sesuai dengan standar nasional. Perhitungan tersebut dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$KKP = KPT \times 1,1$$

Keterangan:

KKP = Kebutuhan persediaan sagu (ton)

KPT = Kebutuhan konsumsi sagu dalam setahun (ton)

1,1 = Faktor konversi sesuai standar nasional

e. Menghitung kebutuhan luas lahan sagu

Kebutuhan luas lahan sagu dihitung menggunakan rumus sebagai berikut :

$$Ln = \frac{KKP}{Y}$$

Keterangan:

Ln = Kebutuhan luas lahan (Ha)

KKP = Kebutuhan persediaan sagu (ton)

Y = Produktivitas sagu (ton/ Ha)

3. Rekomendasi

Tahapan ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi – rekomendasi agar kebutuhan sagu sebagai sumber karbohidrat di Provinsi Papua Barat dapat terpenuhi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejumlah pemerintah daerah di Papua telah menetapkan sagu sebagai salah satu pangan lokal untuk mendukung ketahanan pangan. Pemerintah Provinsi Papua menerbitkan Perda Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pengembangan Pangan Lokal. Pemerintah Provinsi Papua Barat mencangkan panganan olahan berbahan dasar sagu sebagai menu wajib pada acara-acara formal pemerintah provinsi Papua Barat (Papua Kita, 2020). Pada Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2024 tentang Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal, pemerintah menetapkan sagu sebagai salah satu komoditas pangan berkelanjutan.

Pada tahun 2022 pemanfaatan sagu secara nasional sebagai bahan pangan masih sangat rendah, yaitu sebesar 0,335 kg/kapita/tahun, meskipun mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2021 sebesar 0,333 kg/kapita/tahun (Kementerian Pertanian, 2023). Sehingga pemanfaatan sagu di Provinsi Papua Barat pada tahun 2025 dengan jumlah penduduk \pm 587.650 jiwa (BPS Provinsi Papua Barat, 2025) diperkirakan 196,86 ton. Oleh sebab itu pada tahun 2025 jumlah pemanfaatan sagu di Provinsi Papua Barat melebihi potensi produksi sagu yang hanya \pm 190 ton (Kementerian Pertanian, 2024).

Pemerintah menetapkan Angka Kecukupan Energi (AKE) rata-rata nasional sebesar 2.100 kkal/kapita/hari (Badan Pangan Nasional, 2024) dan konsumsi padi-padian sebagai sumber karbohidrat sebesar 50% (Badan Pangan Nasional, 2024), maka jumlah AKE karbohidrat yang ideal \pm 1.050 kkal/kapita/hari. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, setiap 100 gram BDD (Bagian Dapat Dimakan) sagu memiliki kandungan energi sebesar 355 kkal (Kementerian Kesehatan, 2020), sehingga apabila sagu dimanfaatkan sebagai sumber karbohidrat pengganti beras maka kebutuhan konsumsi sagu per kapita (KPB) sebesar 295,77 gram/kapita/hari atau 0,296 kg/kapita/hari. Oleh sebab itu kebutuhan konsumsi sagu (KPT) di Provinsi Papua Barat pada tahun 2025 diperkirakan 63.441,37 ton, dan kebutuhan ketersediaan sagu untuk dikonsumsi penduduk (KKP) Papua Barat pada tahun 2025 sebesar 69.785,51 ton. Pada tahun 2025 produksi sagu di Provinsi Papua Barat hanya \pm 190 ton (Kementerian Pertanian, 2024), sehingga produksi sagu di

Provinsi Papua Barat hanya mampu memenuhi kebutuhan sagu sebanyak 0,886 gram/kapita/hari atau 0,30% KPT dan 0,27% KKP.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Haryanto *et al.* (2015) bahwa setiap pohon sagu di Provinsi Papua Barat hanya menghasilkan pati sagu sekitar 152 kg atau mencapai 9,7 ton/ha. Hal ini disebabkan hutan sagu di Papua Barat belum dikelola dengan baik (Haryanto *et al.*, 2015). Apabila hutan sagu dikelola dengan baik maka produktivitas akan dapat ditingkatkan hingga 20 - 40 ton pati kering/ha (Bintoro & Syakir, 2017; Dalimunthe *et al.*, 2019). Oleh sebab itu, jika tanaman sagu dikelola dengan baik maka luas lahan (Ln) tanaman sagu yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan ketersediaan sagu untuk dikonsumsi penduduk (KKP) Papua Barat pada tahun 2025 diperkirakan seluas 1.744,64 Ha – 3.489,27 Ha. Proyeksi kebutuhan luas lahan sagu (Ln) untuk memenuhi konsumsi penduduk (KPT) dan ketersediaan untuk dikonsumsi penduduk (KKP) di Provinsi Papua Barat tahun 2025 – 2035 apabila sagu akan dimanfaatkan sebagai sumber karbohidrat untuk mengganti beras disajikan pada Tabel 2 dan Tabel 3.

Tabel 2. Proyeksi Kebutuhan Luas Lahan Sagu (Ln) untuk Memenuhi Konsumsi Penduduk (KP) di Provinsi Papua Barat Tahun 2025 – 2035 jika Produksi Sagu 20 Ton Pati Kering/ha

Tahun	Proyeksi Jumlah Penduduk	KPT (ton)	KKP (ton)	Ln (Ha)
2025	587.650	63.441,37	69.785,51	3.489,27
2030	651.390	70.322,60	77.354,86	3.867,74
2035	670.615	72.398,08	79.637,89	3.981,89
Total luas yang dibutuhkan				11.338,90

Sumber: (BPS Provinsi Papua Barat, 2023; BPS Provinsi Papua Barat, 2025; Hasil analisis, 2025)

Tabel 3. Proyeksi Kebutuhan Luas Lahan Sagu (Ln) untuk Memenuhi Konsumsi Penduduk (KP) di Provinsi Papua Barat Tahun 2025 – 2035 jika Produksi Sagu 40 Ton Pati Kering/ha

Tahun	Proyeksi Jumlah Penduduk	KPT (ton)	KKP (ton)	Ln (Ha)
2025	587.650	63.441,37	69.785,51	1.744,64
2030	651.390	70.322,60	77.354,86	1.933,87
2035	670.615	72.398,08	79.637,89	1.990,95
Total luas yang dibutuhkan				5.669,46

Sumber: (BPS Provinsi Papua Barat, 2023; BPS Provinsi Papua Barat, 2025; Hasil analisis, 2025)

Pada umumnya tanaman sagu dapat dipanen pada umur 8 – 12 tahun (Bintoro & Syakir, 2017; Dalimunthe *et al.*, 2019). Sehingga perlu upaya-upaya strategis apabila sagu

akan dimanfaatkan sebagai sumber karbohidrat untuk mengganti beras di Provinsi Papua Barat, diantaranya;

1. Mengimpor sagu dari daerah lain, misalnya Kabupaten Sorong Selatan Provinsi Papua Barat Daya yang memiliki luas sagu \pm 311.591 Ha (Haryanto *et al.*, 2015), Distrik Wapoga Kabupaten Nabire Provinsi Papua Tengah yang memiliki luas sagu \pm 4.345,41 Ha (Dasnarebo *et al.*, 2022),
2. Melakukan perluasan areal tanam sagu melalui budidaya sagu secara intensif untuk meningkatkan produksi sagu (Tamtama *et al.*, 2024),
3. Pengelolaan hutan sagu yang baik untuk meningkatkan produktivitas sagu, misalnya melalui pengaturan drainase, dan penjarangan (Haryanto *et al.*, 2015),
4. Penggunaan teknologi dalam pengolahan sagu untuk meningkatkan pemanfaatan dan kualitas sagu (Tamtama *et al.*, 2024; Gaspersz *et al.*, 2020; Nursalam *et al.*, 2024),
5. Penggunaan varietas unggul dalam budidaya sagu (Tonggroitou *et al.*, 2022), dan
6. Pemanfaatan sagu sebagai sumber karbohidrat pengganti beras dilakukan secara bertahap (Haryanto *et al.*, 2015).

KESIMPULAN DAN SARAN

Sagu belum dapat dimanfaatkan sebagai sumber karbohidrat pengganti beras di Provinsi Papua Barat karena produksi sagu di Provinsi Papua Barat belum mampu mensuplai kebutuhan konsumsi sagu perkapita penduduk. Sehingga perlu peningkatan produksi sagu di Provinsi Papua Barat melalui perluasan areal tanaman sagu secara intensif, penggunaan varietas unggul dalam budidaya sagu, pengelolaan hutan sagu yang baik, serta penggunaan teknologi dalam pengolahan sagu. Dalam jangka pendek kebutuhan konsumsi sagu perkapita penduduk Provinsi Papua Barat dapat dipenuhi melalui impor sagu dari daerah lain di Papua, diantaranya Kabupaten Sorong Selatan Provinsi Papua Barat Daya dan Kabupaten Nabire Provinsi Papua Tengah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ansar, H., Pratiknjo, M. H., & Sandiah, N. (2021). Sagu : Pangan Lokal Masyarakat Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kota Tidore Kepulauan. *Jurnal Holistik*, 14(4), 2021.
- Badan Pangan Nasional. (2024). *Pedoman Penilaian Skor Pola Pangan Harapan*. Badan Pangan Nasional.
- Bintoro, M. H., & Syakir, M. (2017). Sistem Pembibitan Sagu. In E. Karmawati & D. Soetopo (Eds.), *Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian* (1st ed., Vol. 1, Issue 1). Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian.

- BPS Provinsi Papua Barat. (2023). Proyeksi Penduduk Kabupaten/Kota Provinsi Papua Barat 2020 - 2035 Hasil Sensus Penduduk 2020. In *BPS* (1st ed.). BPS Provinsi Papua Barat.
- BPS Provinsi Papua Barat. (2025). Provinsi Papua Barat Dalam Angka 2025. In BPS Provinsi Papua Barat (Ed.), *BPS* (1st ed., Vol. 19, Issue 2025). BPS Provinsi Papua Barat.
- Dalimunthe, L. H., Rana, gayatri K., Ekasari, N., Iskak, P. I., & Andriani, J. (2019). *Sagu (Metroxylon sagu Rottb.)* (E. Setyorini & S. Sutriswanto (eds.); 1st ed., Vol. 1). Kementerian Pertanian.
- Dasnarebo, S., Santoso, B., & Abbas, B. (2022). Potensi luas areal dan karakter morfologi sagu (*Metroxylon sagu Rottb.*) di Distrik Napan, Moora, dan Wapoga Kabupaten Nabire, Provinsi Papua. *Cassowary*, 5(2), 202–210. <https://doi.org/10.30862/cassowary.cs.v5.i2.188>
- Febby I Polnaya, & Timisela, N. R. (2008). Sagu Sebagai Pangan Spesifik Lokal Dalam Mendukung. *Seminar Nasional “Akselerasi Inovasi Teknologi Pertanian Spesifik Lokasi Mendukung Ketahanan Pangan Di Wilayah Kepulauan” SAGU*, 154–160.
- Gaspersz, N., Ubwarin, E., & Rijoly, J. C. D. (2020). Penerapan Teknologi Pengolahan Sagu Untuk Meningkatkan Produksi Sagu Merah-Putih Di Desa Porto. *LOGISTA - Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(2), 70–77. <https://doi.org/10.25077/logista.4.2.70-77.2020>
- Haryanto, B., Mubekti, & Putranto, A. T. (2015). Potensi dan Pemanfaatan Pati Sagu dalam Mendukung Ketahanan Pangan di Kabupaten Sorong Selatan Papua Barat. *Pangan*, 24(2), 97–106.
- Hasbullah, Hidayat, F., & Nasrul, W. (2024). Ekstraksi dan Pemanfaatan Sagu (*Metroxilon sagu*). *Strofor Journal*, 8(1), 259–269.
- Kementerian Kesehatan. (2020). Tabel Komposisi Pangan Indonesia. In *Tabel Komposisi Pangan Indonesia*. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Kementerian Pertanian. (2023). *Statistik Pertanian 2023* (A. A. Susanti & M. A. Supriyatna (eds.); 1st ed.). Kementerian Pertanian.
- Kementerian Pertanian. (2024). Statistik Perkebunan 2023-2025. In *Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan* (1st ed.). Kementerian Pertanian.
- Kurniawan, R. (2018). Sagu dan Olahan Khasnya. In P. Santosa (Ed.), *Proceedings of the National Academy of Sciences* (1st ed., Vol. 3, Issue 1). Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Nursalam, N., Agusriyadin, A., Kartomo, K., Helviani, H., Obi Kasmin, M., Mpia, L., Wilhan Juliatmaja, A., Arruan Bulawan, J., Ashari, A., Rahmawati, R., & Dewaldi, D. (2024). Pemberdayaan Masyarakat Pengolah Pangan Lokal Sagu Melalui Alih Teknologi Untuk Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Produksi Aci Sagu di Desa Simbune Kecamatan Tirawuta Kabupaten Kolaka Timur. *Jdistira*, 4(2), 226–229. <https://doi.org/10.58794/jdt.v4i2.1087>

- Papua Kita. (2020). *Pemprov Papua Barat Wacanakan Olahan Sagu Jadi Menu Wajib Kegiatan Formal*. <https://papuakita.com/blog/2020/10/20/pemprov-papua-barat-wacanakan-olahan-sagu-jadi-menu-wajib-kegiatan-formal/>
- Perserikatan Bangsa-Bangsa. (2015). *Global Sustainable Development Report*.
- Rosida, D. F. (2019). *Inovasi Teknologi Pengolahan Sagu* (Y. M. Supriyadi (ed.); 1st ed.). CV Mitra Sumber Rejeki.
- Santoso, A. D. (2017). Potensi Dan Kendala Pengembangan Sagu Sebagai Bahan Pakan, Pangan, Energi Dan Kelestarian Lingkungan Di Indonesia. *Jurnal Rekayasa Lingkungan*, 10(2), 51–57. <https://doi.org/10.29122/jrl.v10i2.2852>
- Suripatty, B. A., Poedjirahajoe, E., Pudyatmoko, S., & Budiadi, B. (2016). Pertumbuhan Sagu (*Metroxylon* sp) di Hutan Alam Papua. *Jurnal Hutan Pulau-Pulau Kecil*, 1(2), 151–159. <https://doi.org/10.30598/jhpk.2016.1.2.151>
- Tamtama, A., Akhmad, Irma Sribianti, & Mohammad Natsir. (2024). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Produksi Sagu (*Metroxylon* SP) di Kabupaten Konawe Selatan. *Agrisurya*, 3(1), 9–17. <https://doi.org/10.51454/agrisurya.v3i1.633>
- Tonggroitou, S., Palennari, M., & Rante, P. (2022). Upaya Pelestarian Sagu di Papua. *Profesi Kependidikan*, 3(1), 31–36.